

**DAMAI DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTUR
DAN MULTIAGAMA
M. SIDI RITAUDIN***

Abstak

Fenomena Islam politik, khususnya di Indonesia, ditafsirkan dan hadir dalam wajah majemuk dan plural. Asasnya adalah Pancasila dan UUD-1945 yang memposisikan asas kesatuan sebagai landasan idiilnya. Oleh karena itu, persentuhan Islam dengan politik pun, dalam konteks Indonesia, berwujud kebinnekaan. Toleransi merupakan suatu bingkai penyatuan dalam sistem kebangsaan dan kenegaraan yang penduduknya bersifat majemuk, baik dari segi, pulau, ras, suku, bahasa, adat budaya dan lain sebagainya termasuk agama. Fungsionalisasi agama sebagai sumber motivasi bagi pembangunan, yaitu menciptakan suasana kondusif bagi peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama. Semua agama mengajarkan saling menghormati dan saling menghargai, oleh sebab itu menghidupkan dialog keagamaan merupakan suatu keniscayaan bagi keberlangsungan negara kesatuan.

Kata Kunci : Perdamaian, pluralisme, toleransi, dialog, multi kultur, multiagama

Prolog

Diskursus perdamaian menunjukkan signifikansinya bila manusia mau menyadari bahwa eksistensi kemanusiaannya itu tidak mungkin terjadi jika ia hidup sendirian. Perdamaian merupakan suatu keniscayaan dalam komunitas masyarakat majemuk. Eksistensi manusia tidak bisa dipisahkan dari komunitas, baik komunitas sosial, politik, budaya maupun agama tertentu. Kesatuan manusia dengan komunitasnya ikut menentukan caranya menampilkan diri dan berinteraksi dengan yang lain. Begitu juga kesatuan manusia dengan komunitas agama tertentu ikut membentuk caranya beragama dan mengekspresikan agamanya tersebut. oleh karena itu, selalu relevan memperbincangkan hubungan politik dengan agama, serta

kontribusinya bagi perdamaian dunia guna menepati penghargaan Sang Pencipta bahwa manusia diciptakan-Nya sebagai sebaik-baiknya ciptaan dan mampu mewujudkan sebuah peradaban yang tinggi. Di sini jelas kontribusi agama dalam mewujudkan politik perdamaian adalah dengan melaksanakan amal saleh, transparansi dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.¹

Peradaban manusia yang tinggi dapat terwujud dalam kehidupan politik yang demokratis. KH. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa di mana-mana gerakan agama secara aktif mendorong upaya penegakan demokrasi.² Artinya semua agama sesungguhnya mengajarkan spirit demokrasi. Sehingga secara simpelistis Bahtiar Effendi mengatakan bahwa jika dalam suatu negara atau komunitas terjadi kekerasan, maka pertanyaannya adalah apakah agama itu masih fungsional apa tidak ?³ Bagi Gus Dur, eksklusivitas suatu agama atas agama-agama lain merupakan faktor pemicu adanya kekerasan agama, baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Dinamika intern agama-agama di dunia menunjukkan perbenturan keras antara mereka yang ingin melakukan transformasi kehidupan masyarakat dari titik tolak keagamaan, dan mereka yang mempertahankan status quo keadaan dengan segala daya upaya.⁴

Konsep demokrasi sejalan dengan pemikiran pluralisme yang menyamakan derajat dan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul, etnis, agama, jenis kelamin dan bahasa ibu. Sementara agama hanya sebatas saling toleransi, kesepahaman dan hormat-menghormati dalam berlainan agama dalam suatu negara. Dalam bahasa Perbandingan Agama : *agree in disagreement*, setuju dalam

¹Antara lain disebutkan dalam Al-Qur'ân surat *at-Tin*, ayat 4 dan 6 “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*” .” *orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya*”.

²Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi” dalam Elga Sarapung dkk (Tim Ed.), *Spiritual Baru Agama dan Aspirasi Rakyat*, (Yogyakarta : Institut DIAN/Interfidei, 2004), h. 329.

³Pernyataan Bahtiar ini ia kemukakan dalam Seminar Nasional “Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Perdamaian” pada hari Senin 19 Oktober 2009 di Hotel Grand Nagroe, Banda Aceh.

⁴Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi” dalam Elga Sarapung dkk (Tim Ed.), *Spiritual Baru Agama dan Aspirasi Rakyat*, (Yogyakarta : Institut DIAN/Interfidei, 2004), h. 331.

perbedaan, yang diturunkan dari konsep *lakum dīnukum walī al-dīn*. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak boleh saling mencerna dan saling memperolok-olokkan, dengan demikian akan terwujudlah perdamaian dalam masyarakat atau negara.

Khalifatullah Mengusung Misi Perdamaian

Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia secara fungsional sebagai khalifah (*the servant of God*), dan melanjutkan peradaban dunia, sudah barang tentu mengusung sebuah misi perdamaian. Dalam rangka memerankan fungsinya sebagai *khalifatullah* di muka bumi, maka manusia harus melakukan pemadatan atau mendapatkan infus, atau amuniasi energi ke-Tuhan-an dalam dirinya, sehingga manusia memiliki energi ke-Tuhan-an yang prima dan mampu menata kehidupan dunia (politik pemerintahan/negara).

Misi kenabian yang diturunkan dalam suatu komunitas adalah membangun peradaban. Pilar utama peradaban adalah *akhlâq al-karîmah*, sebagaimana sabda nabi yang mensinyalir bahwa Rasulullah Saw itu diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan *akhlâq al-karîmah*. Akhlak ini secara konseptual terbagi dua, yaitu menata hubungan manusia secara vertikal kepada Sang Pencipta dan hubungan manusia secara horizontal kepada sesama manusia dan alam mayapada ini. Harmonisasi kedua bentuk relasi manusia dalam interaksinya akan terwujud jika norma-norma etika atau tata susila yang bernama *akhlâq al-karîmah* difungsikan. Dengan kata lain, misi perdamaian dapat terwujud jika dalam suatu komunitas menjunjung tinggi etika dan moralitas.

Etika dan moralitas dalam perilaku politik yang efektif adalah dengan memosisikan agama yang tampil dengan fungsi profetiknya, sehingga ia dapat membebaskan manusia dari kekerasan dan pertumpahan darah. Karena dalam agama (khususnya Islam) melakukan dakwah dituntut untuk bersikap arif, bijak dan lemah lembut, dengan pendekatan kultural, mengetuk dan sekedar mengetuk hati orang, siapa tahu mereka bersedia turut memenuhi panggilan kebenaran Tuhan. Dengan sikap moderat seperti ini, tampilan Islam akan lebih menawan dan

menebar perdamaian.⁵ Tidak dengan cara kekerasan atau pemaksaan. Apalagi dengan melakukan kekerasan untuk tujuan formalisme agama dalam negara, yang dalam catatan sejarah selalu menemui kegagalan.⁶

Isu perdamaian menjadi penting untuk membangun peradaban manusia, karena dalam suasana perang, huru-hara dan kekacauan tidak mungkin dapat melakukan sesuatu yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi. Isyarat al-Qur'ân cukup jelas bahwa anak cucu Adam akan selalu "bertengkar", terjadi kekerasan di antara mereka sampai pada saling menumpahkan darah.⁷ Akan tetapi, sebagai khalifah, manusia mempunyai tugas dan mengemban misi perdamaian, mencegah kekerasan, apalagi sampai saling menumpahkan darah (perang). Untuk dapat melaksanakan misi perdamaian tersebut, maka manusia harus selalu menjaga keimanan dari kemusyrikan. Musyrik menuhankan kekuasaan, musyrik menuhankan jabatan, musyrik menuhankan harta benda. Oleh karena itu, manusia tidak boleh tamak, sok

⁵Tentang sikap Muslim yang harus lunak ini Prof. Dr. Muhayya berdalil "wa 'alaika bitharîqati al-hudâ, walâ yakhâfu biqillati al-shâlih", hendaknya engkau melakukan sesuatu dengan petunjuk Allah dan tidak perlu khawatir dengan sedikitnya orang-orang yang shalih. Disampaikan dalam Seminar Nasional "Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Perdamaian" di Hotel Brand Naggroe Banda Aceh, Senin 19 Oktober 2009.

⁶Sekilas pandangan ini berbau sekularistik, namun pandangan integralistik, dalam konteks Indonesia, sudah tidak mungkin, karena komitmen dalam kontrak politik rakyat Indonesia adalah dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai panglimanya dengan semboyan NKRI. Maka yang paling mungkin adalah dengan pemikiran Islam substansialistik dengan mengetengahkan etika agama dalam politik. Lihat kajian lebih lanjut, Hasan Hanafi, *al-Dîn wa al-Tsaurât fî Mishr 1952-1986, al-Dîn wa al-Tanmiyyât al-Qaumiyât*, (Kairo : Maktabat Madbûlî, 1989), h. 6. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Abu Zahrah (ed.), *Politik Demi Tuhan : Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), h. 20, 45-46, 49. Imâm 'Âli ibn Muhammad Al-Mâwardî, *al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah wa al-Walâyât al-Dîniyyah*, (Kairo : Musthofa al-Bâbî al-Halabi, 1983), h. 7. Negara dan sistem pemerintahan dalam Islam membentang tiga mazhab; *ushûliyyah* (Fundamentalisme), biasa disebut sebagai paradigma integralistik, *al-Mâniyyah* (sekularisme) biasa disebut sebagai paradigma sekularistik, dan *wasathiyah* (moderatisme) biasa disebut dengan istilah paradigma simbiotik. Lihat, M. Sidi Ritaudin, *Paradigma Sinektika Politik Islam*, (Bandarlampung : Penerbit Pusikamla, 2009), h. 103-109.

⁷ Lihat Q.S. *al-Baqarah* : 30.

jagoan, arogan dan meremehkan orang lain. Dalam konteks ini, agama hendaknya diposisikan sebagai pembawa rahmat,⁸ oleh karena itu Islam yang diturunkan ke bumi ini membawa misi perdamaian (pembawa rahmat).

Konflik selalu setia menghancurkan peradaban, oleh karena itu konflik harus di tata, *dimanage*, agar mendapat saluran yang proforsional. Salah satu tips-nya adalah dengan menghindari politik stigma.⁹ Konflik merupakan anugerah bila ditata dengan baik, jika tidak maka dia dapat menjadi sumber petaka bagi penghancuran tatanan perdamaian. Konflik itu lahir sejak adanya manusia di muka bumi, karena Tuhan memberikan rahmat-Nya dengan konflik tersebut, yaitu bila dapat keluar dari persoalan pertentangan dan perbedaan maka dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dari informasi ayat 13 surat *al-Hujurat* tersebut cukup jelas kiranya bahwa konflik itu merupakan *sunnatullah*. Manusia berbeda pendapat, berbeda pola pikir, berlainan suku, ras, warna kulit adat istiadat dan agama memang merupakan kehendak Sang Maha Pencipta, yang tidak perlu dipertentangkan melainkan bagaimana upaya kita dengan perbedaan tersebut dapat meningkatkan iman dan ketakwaan, selesai.¹⁰

Pemicu Kekerasan Politik

Pemikiran politik yang berbasis pada paradigma integralistik mendorong bangkitnya paradigma dwipolar dengan terminologi *dâr al-harb* dan *dâr al-Islâm*, mendatangkan akibat yang sangat dahsyat, baik segi positif maupun segi negatifnya. Di kalangan umat Islam di mana saja terdapat perasaan tidak senang tertentu terhadap non Muslim, oleh berbagai alasan dan latar belakang. Namun di Barat dikenal sebagai “anti Semitisme” yang sempat memuncak menjadi *Genocide* dan *Holocaust* oleh Nazi Jerman, perasaan kurang positif Muslim terhadap non Muslim tidak ada artinya. Bahkan masih dalam batas-batas yang wajar dan manusiawi, seperti halnya setiap perasaan yang ada pada suatu kelompok terhadap kelompok lain. Prasangka dan stereotip negatif adalah bagian dari kenyataan hubungan antar kelompok.

⁸ Lihat Q.S. *al-Anbiyâ'* : 107.

⁹ Model stigma yang merugikan bagi penciptaan perdamaian antara lain disebutkan dalam al-Qur'ân surat *al-Hujurat* ayat 11.

¹⁰ Disebutkan dalam al-Qur'ân surat *al-Hujurat* ayat 13.

Namun tidak semua kelompok membenarkan adanya prasangka dan stereotip kepada kelompok lainnya, dan banyak dari mereka, setidaknya yang membangun visi politiknya dengan dasar paradigma simbiosis atau kaum substansialis, yang berkomitmen untuk memberantasnya.¹¹

Kaum Muslim, dalam hubungannya dengan agama-agama lain, khususnya Yahudi dan Kristen, dapat dikategorikan sebagai kelompok yang berkomitmen untuk memberantas stereotip negatif. Hal ini disandarkan pada sikap Nabi Saw setelah Perjanjian Hudaibiyyah (*Sulh al-Hudaibiyyah*), yang pada prinsipnya saling berkomitmen dalam perbedaan, saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah terdapat kasus-kasus yang dapat diungkap, mengapa para ulama klasik mendukung konsep dwipolar tersebut. Di samping adanya gangguan kesejarahan seperti imperialisme Barat dan Zionisme Yahudi pada zaman modern atau pra modern; ada dua kasus yang terjadi pada saat Nabi Saw mengirim delegasi ke masyarakat di negara-negara tetangga yang sama sekali tidak mengenal Islam, atau yang pemimpinnya tidak mengetahui realitas kemunculan agama baru dan yang mendasarkan hukumnya pada perundang-undangan yang tidak adil.

Kasus pertama adalah ketika Nabi Saw mengutus Harits ibn Umair ke Romawi, ia dibunuh oleh Amr al-Ghassani, salah satu dari menteri kekaisaran Romawi, sehingga menyebabkan terjadinya peperangan, yang jelas bukan tujuan dari delegasi tersebut maupun kaidah untuk hubungan dengan bangsa-bangsa tetangga. Kasus kedua terjadi peperangan melawan Persia pada waktu pemimpin mereka merobek-robek al-Qur'ân di depan utusan Nabi Saw dan memerintahkan beberapa tentara untuk pergi dan membawa "Si Muhammad hidup-hidup" kepadanya. Kedua reaksi ini dipahami sebagai deklarasi perang. Akan tetapi, pada mayoritas kasus lainnya, pesan Nabi disampaikan tanpa perangan atau ketegangan sedikit pun.

Hubungan politik antara Muslim dan non Muslim, setelah mengkaji tindakan Nabi Saw, secara fundamental, harus dipahami

¹¹Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta : Paramadina, 2000), h. xc.

bahwa kaum Muslim berpegang pada prinsip perdamaian, bukan peperangan. Dalam konteks itu pula, Nabi Saw tidak memiliki kepentingan pribadi dalam menyampaikan pesan ke umat dan tidak mengambil alih kekuasaan. Realitas kesejarahan memperlihatkan bahwa Nabi Saw selalu memerangi para pemimpin disebabkan pembunuhan, pengkhianatan, atau ketidakadilan yang mereka lakukan, dan Nabi saw tidak pernah memerangi masyarakat hanya karena mereka menolak Islam.¹²

Tidak dapat dipungkiri bahwa term *al-Harb* (perang) konotasinya adalah pembunuhan. Secara konsepsional, dalam pandangan Islam perang itu tidak identik dengan pembunuhan. Suatu kesepakatan universal menunjukkan bahwa sekali suatu hidup terwujud maka ia harus dilindungi dan dihormati. Ajaran agama melarang pembunuhan, serta pandangan bahwa pembunuhan adalah kejahatan besar, tidak bisa lain daripada harus diinterpretasikan bahwa menurut agama, hidup itu secara intrinsik adalah berharga dan harus dilindungi. Demikian pula dalam bentuknya yang lebih positif, perintah agama untuk membantu dan menolong sesama manusia, dan pandangan bahwa tindakan itu sebagai kebajikan besar.

Apa pun alasan dan latar belakangnya membunuh sesama manusia merupakan hal yang dikutuk oleh agama. Maka jika ada seorang "teroris" yang berpandangan bahwa "menjadi pengantin bom" merupakan jalan pintas menuju sorga, itu adalah ajaran yang sesat. Doktrin politik yang tidak berdasar.¹³ Betapa konsepsi Islam tentang kemanusiaan begitu agung dan mulia. Maka jika ajaran Islam diamalkan dengan benar, kehidupan di muka bumi akan damai dan tentram, karena Islam itu merupakan rahmat bagi sekalian alam. Cukup dengan ayat di atas (*Q.S. al-Maidah/5 : 32*). dapat ditegaskan bahwa "terorisme" dalam arti tindakan kekerasan, perang dan pemboman dengan mengakibatkan tragedi kemanusiaan, seperti kasus di menara kembar Amerika Serikat, Bom Bali I dan II, bom JW Mariot I dan II dan bom Ritz Carlton, yang kesemuanya telah merenggut ratusan bahkan ribuan nyawa orang-orang yang tidak berdosa; ini jelas-jelas tidak benar kalau bersumber dari ajaran Islam.

¹²Tariq Ramadan, *Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa*, (Bandung : Penerbit Mizan, 2002), h. 141.

¹³*Q.S. al-Maidah/5 : 32*.

Nilai-nilai ajaran Islam diberimakna universal, yaitu iman dan keadilan dan mempertanggungjawabkan tindakan sosial dan politiknya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tidak relevan mendikhotomi, atas dasar kebencian, ini golongan kami dan ini golongan mereka. Ini orang Barat dan yang ini orang Timur karenanya harus diperangi, harus dibom disebabkan beda akidah, dan sebagainya.¹⁴

Ayat-ayat tersebut (Q.S *al-Hujurat/49* ; 9 , 10 , 11, 12 dan 13) menegaskan bahwa yang paling penting bukanlah identitas etnis, suku, ras atau jenis kelamin, melainkan ketakwaan. Nilai takwa dapat diperoleh jika dapat mewujudkan sikap toleran, saling menghargai antar sesama manusia. Tidak dibenarkan saling mencemooh, apa lagi diiringi dengan sikap sombong dan membanggakan ras, suku atau golongan. Semua jenis apa pun dan kelebihan apa pun yang dianugerahkan Tuhan padanya, tetap memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan, dan oleh karenanya sesama manusia yang merupakan sama-sama makhluk Tuhan harus menjaga solidaritas kemanusiaan, dan tidak dibenarkan saling berperang dan saling men"teror" satu sama lainnya.

Akar Kekerasan dan Teror

Kekerasan, keganasan, kebengisan ataupun teror (*violent*) dalam politik berakar dari ideologi yang juga keras. Ideologi keras ini ditandai dengan pengabaian terhadap nilai-nilai toleransi, karena menganggap dirinyalah yang paling benar. Jika belakangan ini Amerika dan sekutunya (Barat) mengidentikkan kelompok teroris dengan kaum Muslim, tentu saja hal ini merupakan tuduhan yang sangat keliru. Sebagaimana telah dipaparkan, bahwa Islam membawa ajaran yang santun dan lemah lembut, tidak pernah mentolerir sikap dan perbuatan yang menjurus pada kekerasan. Jika terjadi teror yang dilakukan oleh oknum Muslim, maka perlu dilihat terlebih dahulu latar belakang dan ideologi yang ia anut secara komprehensif.

Kerangka dasar negara republik Indonesia, yaitu undang-undang dasar 1945, menegaskan bahwa sistem politik Indonesia adalah sistem yang berdasarkan Pancasila dan UUD-1945, sudah final. Adanya partai-partai fundamentalis keagamaan yang mementingkan simbol-simbol dan label-label khas seperti sebutan "negara Islam" atau Islam sebagai dasar/falsafah negara,

¹⁴ Q.S *al-Hujurat/49* ; 9 , 10 , 11, 12 dan 13.

memunculkan sebuah fenomena yang kontra produktif dengan program-program politik yang berhubungan dasar negara, demokrasi, struktur pemerintahan dan undang-undang.

Dasar negara yang diinginkan oleh kaum fundamentalis adalah Al-Qur'ân dan Sunnah. Mereka berangkat dari keyakinan bahwa ajaran Islam bersifat perfektif. Oleh karenanya soal-soal keduniawian, seperti politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, konsep-konsep dasarnya sudah ada dalam kedua narasumber tersebut. Maka dasar negara yang ideal dan memiliki kebenaran mutlak adalah Al-Qur'ân dan Sunnah. Ideologi inilah yang kerap kali muncul ketika sistem demokrasi tidak dapat memenuhi hajat kepentingan rakyat dalam pemerintahan, seperti adanya monopoli, pelanggaran HAM dan kasus-kasus korupsi yang tidak ditindak dengan hukum yang tegas, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem penyelenggaraan negara yang demokratis, masih diperdebatkan juga, sebab menurut mereka, konsep demokrasi "ala Barat" tidak diperlukan, bahkan menyesatkan. Demokrasi adalah satu sistem politik dan sosial yang timbul di Barat, yang dikenal oleh peradaban Barat modern dari peradaban Yunani kuno. Islam, pada dasarnya, dalam masalah-masalah hidup, keorganisasian, sistem dan sarana yang dipakai untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan filsafatnya, tidak selalu menutup begitu pula tidak senantiasa menerima bagi semua yang datang dari luar, tanpa memahami dan melakukan ijtihad.¹⁵ Namun demikian, karena karakter khas dari aliran pemikiran fundamentalisme adalah menolak interpretasi dan ijtihad, maka mereka menolak sistem politik demokrasi.

Terhadap struktur pemerintahan, jelas kaum fundamentalis bersifat romantis, menurut Leonard Binder, bahwa "fundamentalisme adalah aliran yang bercorak romantis kepada Islam periode awal",¹⁶ mereka ingin mengembalikan sistem khilafah pada masa klasik, sebagaimana zaman Rasulullah dan khulafaur-Rasyidin. Atas dasar keyakinan tersebut mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dalam memperjuangkan cita-

¹⁵Muhammad Imarah, *Perang Terminologi, Islam Virsus Barat*, (Jakarta : Rabbani Press, 1998), h. 179.

¹⁶Leonard Binder, *Religion and Politics in Pakistan*, (Los Angeles : The University of California Press, 1961), h. 71.

cita dan tujuan mereka. Segala yang menghadang implementasi syari'ah, atau apa saja yang bertentangan dengan teks ajaran agama mereka posisikan sebagai ajaran *jahiliyyah*, termasuk trend modern dewasa ini, seperti kebebasan individual, pluralitas keagamaan, suasana sekuler, rasionalisme, revolusi seks, revolusi dalam cara berpakaian, musik pop dan lain-lain.¹⁷

Para pengamat pada umumnya sepakat memberi penilaian bahwa para teroris yang rela menjadi "penganten bom" bunuh diri sebagai jihad dalam menegakkan kebenaran agama, namun di sisi lain, mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa, seperti tamu hotel, anak-anak, ibu-ibu dan orang tua, merupakan perbuatan keji dan bertentangan dengan konsep dasar Islam. Oleh karena itu mereka merekomendasikan agar pengertian jihad yang sudah diindoktrinasikan kepada para pelaku teror harus ditinjau ulang. Maka sebahagian dari ulama memfatwakan bahwa teror itu hukumnya haram. Semua elemen yang terlibat, perakit bom, perekrut calon pengantin, pelakunya dan bahkan otak yang ada di balik semua peristiwa teror juga termasuk orang-orang yang mengatasnamakan agama dan jihad *fi sabilillah*, semuanya haram.

Tegakkan Perdamaian dengan Dialog dan Toleransi

Keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian umat manusia, secara konseptual, diajarkan oleh setiap agama sebagai tujuannya. Fungsionalisasi agama sebagai sumber motivasi bagi pembangunan, yaitu menciptakan suasana kondusif bagi peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama. Toleransi merupakan suatu bingkai penyatuan dalam sistem kebangsaan dan kenegaraan yang penduduknya bersifat majemuk. Pembangunan bidang keagamaan perlu diarahkan kepada kemungkinan substansiasi agama bagi kepentingan pembangunan itu sendiri. Pendekatan formalistik terhadap agama, dalam konteks Indonesia, akan merontokkan sendi-sendi toleransi dan kerukunan itu sendiri.¹⁸

¹⁷Frans Magnis Suseno SJ, *Fundamentalisme Agama dan Keagamaan Liberal*, Makalah yang disampaikan dalam seminar "Islam Liberal dan Islam Fundamental" FMPS Syarif Hidayatullah, Jakarta, 11 Mei 2002.

¹⁸Lihat M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 219.

Menurut KH. Hasyim Muzadi, tidak banyak pilihan bagi rakyat Indonesia untuk menciptakan perdamaian abadi di muka bumi ini selain dengan cara membangun dialog antaragama dan penganut kepercayaan. Lebih jauh Muzadi menandakan bahwa dialog merupakan jalan yang tepat untuk menciptakan sikap saling mengerti dan saling memahami perbedaan agama yang ada. Secara meyakinkan, ia pun mengatakan bahwa dengan dialog, bisa mengatasi perbedaan, membangun keterbukaan, menyusun agenda bersama, dan mencanangkan aksi-aksi konkret.¹⁹

Forum dialog antaragama harus dijadikan landasan bagi langkah-langkah nyata para *stakeholder* di berbagai tingkatan yang berbeda untuk menggiatkan dialog. Upaya ini sangat penting untuk merealisasi perdamaian abadi. Dan pada tingkat internasional, penciptaan dialog adalah semacam alat penangkal bagi apa yang dikatakan Huntington sebagai "akan terjadinya benturan peradaban" itu.

Dalam konteks demokrasi, pluralisme adalah keniscayaan yang harus dihormati, dan keharmonisan lintas budaya dan agama adalah kemutlakan yang harus ada. Penghargaan terhadap pluralisme dan terjadinya harmonisasi sosial adalah prasyarat terjadinya kohesi sosial dan itulah yang mesti dijadikan dasar utama untuk menopang kekuatan demokrasi. Menangani perbedaan kelompok sosial dengan corak budaya ataupun agama dalam sebuah sistem yang cocok--seperti di Indonesia --adalah persoalan rumit. Tapi problem ini bukan tidak ada jalan keluarnya. Bagi Muzadi, kunci utamanya adalah sikap moderat (*tawassuth*) yang bertolak belakang dengan sikap ekstremis (*thatharruf*).

Setiap agama mengajarkan pentingnya menjalani hidup moderat.²⁰ Contoh signifikan adalah sikap moderat dalam Buddha diilustrasikan dalam perjalanan spiritual Pangeran Siddhartha. Dalam proses perjalanannya untuk memperoleh pencerahan, Siddhartha mendengar bisikan seorang musisi (seniman) yang menjelaskan bagaimana menyetel nada sebuah sitar: "Jika kamu

¹⁹Baca KH. A Hasyim Muzadi, "Harmonisasi Masyarakat Multikultur-Multiagama" dalam *Opini*, (Kortem, Selasa, 03 Oktober 2006).

²⁰Sikap moderat akan tumbuh dan berkembang jika terbangun sebuah dialog antarumat beragama. Zainuddin MZ menegaskan bahwa Indonesia (perspektif NKRI) siap berbeda, tetapi tidak harus berpisah. Disampaikannya dalam satu jam lebih dekat dengan Zainuddin MZ di *TV One* 23 Juli 2009.

terlalu kencang menarik kawat, sitar akan macet, dan jika kamu membiarkan senar terlalu lembek, sitar tidak akan berbunyi dan tak bisa dimainkan." Isyarat ini mendatangkan kesimpulan bagi Siddhartha bahwa bagian dari pencerahannya adalah berada di tengah-tengah dan berdiri di antara garis batas dua titik ekstrem yang berlawanan.

Harus disadari kembali bahwa agama secara sosiologis, apa pun agamanya, pertama-tama adalah keyakinan dan prinsip hidup. Penganut agama memang fanatik terhadap ajaran agamanya. Karena itu tidak heran kasus kartun Nabi di Denmark beberapa waktu yang lalu memancing protes besar-besaran dari umat Islam. Sebelumnya, pada dekade 80an seorang budayawan membuat peringkat Nabi Muhammad, di bawah Iwan Fals, sebagai orang yang paling berpengaruh, juga menimbulkan keresahan sosial.

Umat manusia membutuhkan sesuatu yang diyakininya. Kalau mereka tidak terdidik dari kecil dalam agama sehingga tidak punya keyakinan, mereka akan cari sesuatu yang akan diyakini. Tidak masalah apakah itu aliran kepercayaan, ajaran Lia Eden, dan lainnya di Indonesia. Maka agama secara sosiologis adalah segala macam keyakinan yang dianggap paling penting dalam kehidupan seseorang atau sekelompok orang dan selalu dianut dan dipertahankannya. Yang tidak punya keyakinan dari salah satu dari berbagai kitab tersebut, juga membutuhkan hidup dalam keyakinan. Ada yang dinamakan skeptisme, relativisme, nihilisme dan lainnya.²¹

Pemikiran Politik Moderat Berbasis Religi

Islam diturunkan untuk masyarakat plural. Pluralitas dalam pandangan Islam adalah suatu keniscayaan. Umat lain tidak boleh dipaksa masuk Islam. Kebebasannya menjalankan ibadah menurut agamanya harus dijamin. Maka soal toleransi umat beragama, ajaran Islam tidak perlu diragukan. Tapi keyakinan mereka kepada ajaran agamanya juga tidak boleh goyah dengan isme apa

²¹Bustanuddin Agus "Meluruskan Persepsi Pluralisme" dalam *Opini* (Republika, Jumat, 15 Desember 2006)., bandingkan, Theo Huijbers, *Manusia Mencari Allah Suatu Filsafat Ketuhanan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1985). Baca juga, Hamzah Ya'kub, *Filsafat Ketuhanan*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1984).

pun.²² Pandangan ini merupakan prioritas utama dalam membangun bangsa (*nation building*). Harus ditanamkan keyakinan bahwa agama yang dapat memberikan kebahagiaan sejati kepada kemanusiaan dan mengantarkan mereka menuju surga adalah agama yang mengajarkan nilai perdamaian, keadilan, kebebasan, moderasi, toleransi, keseimbangan, musyawarah, dan persamaan.²³

Essensi dialektika dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa dalam konteks politik, elite politik atau penguasa, atau pemerintah, hendaklah melaksanakan tugasnya secara adil, bersikap jujur terhadap siapa-saja tentunya. Artinya identitas Muslim sejati adalah moderat, sebagaimana ditegaskan oleh Kareem Elbayar, bahwa Mayoritas muslim dunia yang berjumlah 1,5 miliar sebenarnya adalah orang-orang moderat yang cinta damai, yang menolak ekstremisme sadistis dan teror. Muslim moderat ada di sekeliling kita. Muslim moderat dan progresif ada di mana-mana, Satu-satunya cara mencegah "benturan peradaban menjadi ramalan yang nyata adalah membangun jembatan di antara komunitas kita."²⁴

Pada tradisi Hindu, Yajur Weda (40-5) mengajarkan bahwa siapa yang ingin mewujudkan kehendak Tuhan tertinggi harus mengikuti bagian dari moderasi, kebenarannya, dan hukum-hukumnya. Baghavad Gita menegaskan, dedikasi bakti adalah lewat sikap moderat yang akan membimbing seseorang menuju Tuhan semesta. Sikap moderat ini dalam kerangka membangun *citizenship*, yaitu budaya saling menghargai, menghormati eksistensi individu dan kelompok. Sehingga, dalam budaya *civility* dipentingkan dialog-dialog emansipatoris dan partisipatif bukan hubungan-hubungan yang menindas dengan dalih apapun.²⁵

Islam sangat jelas menekankan sikap moderat. Islam menekankan moderasi dan menjaga keseimbangan dalam setiap

²²Hasyim Muzadi, (*Republika* 21 dan 22/10/2005).

²³(Al-Qur'ân 4:135.).

²⁴Kareem Elbayar, (Wakil Ketua Muslims for Progressive Values), "Menjadi Muslim Moderat" dalam , *Opini* (Kortem, Sabtu, 29 Desember 2007).

²⁵I Nyoman Tika, "Agama, Politik dan Negara Perspektif Hindu", dalam, Abdul Munir Mulkahn, dkk, *Agama dan Negara Perspektif : Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan*, (Yogyakarta : Institut DIAN/ Interfidei, 2002), h. 86.

dimensi kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'ân, Allah SWT berfirman, "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) yang moderat..." (Al-Baqarah: 143). Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Berhati-hatilah terhadap berlebih-lebihan dalam beragama. Banyak umat sebelum kamu celaka akibat sikap berlebih-lebihan itu."

Dalam konteks multikulturalisme dan multiagama, dapat ditegaskan bahwa moderasi adalah "katup pengaman" yang dapat menutup kesenjangan yang ada, apakah itu kesenjangan antara kesadaran dalam beragama dan doktrinnya, atau kesenjangan antara apa yang bisa kita capai atau raih dan apa yang akan kita capai, antara *das sein* (apa yang terjadi) dan *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi), serta antara hak dan tanggung jawab. Paralel dengan sifat kebajikan itu, ada ajaran damai (*silm or salâm*), keadilan (*'adâlah*), kebebasan (*hurriyyah*), toleransi (*tasâmuh*), keseimbangan (*tawâzun*), musyawarah (*syûrâ*), dan persamaan (*musâwâh*). Tegasnya, moderasi akan membebaskan umat dari penderitaan dan mengarahkan kita menuju kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.²⁶

M. Hasibullah Satrawi mengemukakan bahwa membaca Al-Qurân secara keseluruhan, bagaikan mengarungi lautan pluralisme. Setidaknya, di dalam Al-Qurân terdapat sebanyak 255 ayat terkait langsung dengan pluralisme. Ayat-ayat itu belum disatukan dengan fakta historis sebagaimana dicontohkan Nabi dan para sahabatnya. Dalam salah satu hadis, Nabi bersabda, yang positif bagi kita juga positif bagi mereka. Dan yang negatif bagi kita, juga negatif bagi mereka. Oleh karenanya, sulit dipahami bila pluralisme dianggap ajaran 'impor', apalagi dianggap ancaman dan diharamkan.²⁷

Pluralisme bukanlah paham yang liar seperti yang dikhawatirkan banyak pihak belakangan. Karena pluralisme berada di bawah kendali 'titik temu'. Dari titik temu inilah perbedaan yang ada tak seharusnya dianggap sebagai laknat, melainkan rahmat. Titik temu pluralisme kehidupan adalah Sunnah Ilahi. Allah swt sudah menciptakan manusia dan segala

²⁶A. Hasyim Muzadi, (*Republika* 21 dan 22/ 10/2005).

²⁷Lihat, M. Hasibullah Satrawi (Alumni Al-Azhar Kairo Mesir, Peneliti di P3M Jakarta.) "Menyelami Lautan Pluralisme Islam" dalam *Opini* (Republika, Jumat, 22 Desember 2006).

ciptaan-Nya dengan segala perbedaan warna, bentuk, karakter, kecenderungan, dan fugsinya. Di tataran global, pluralisme berada di bawah naungan titik temu kemanusiaan. Perbedaan negara, bangsa, budaya, bahasa, dan lainnya 'berteduh' di bawah payung kemanusiaan. Maslahat kemanusiaan harus terus diperjuangkan oleh manusia, tak peduli dari negara mana, dari bangsa apa ataupun berbahasa apa.

Sedangkan dalam konteks nasional, maslahat kebangsaan menjadi titik temu bagi semua anak bangsa di ragam agama, budaya, suku, dan warna-warna lainnya. Kemaslahatan bersama sebagai bangsa harus senantiasa dijunjung tinggi oleh semua anak bangsa. Tak peduli beragama apa, dari suku mana ataupun berasal dari ormas apa. Semuanya berteduh di bawah naungan nasionalisme dan harus terus menjaga kemaslahatan bersama. Sungguh bijaksana ketika Allah berfirman dalam kitab-Nya, “*Wahai manusia, sungguh telah Aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan Aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku hingga bisa saling mengenali*” (QS 49: 13).

Damai di Tengah Multikultur dan Multiagama

Realitas NKRI dengan konsep kebhennekaannya tentu saja memiliki tantangan yang sangat dahsyat, karena hal itu merupakan konsekuensi dari suatu *plurality*, atau *pluriformity*. *Plurality* artinya *the state of being plural*,²⁸ bentuk jamak atau majemuk, alias keanekaragaman. Istilah *pluriformity* terambil dari akar kata bahasa latin *pluriformis*, yang berarti pelbagai, warna-warni, macam, bervariasi.²⁹ Dengan demikian, ada kedekatan antara arti yang dikandung dalam istilah *plurality* dan *pluriformity*, keduanya mengacu pada keanekaan, kepelbagaian, keanekara-gaman, kemajemukan yang ditemukan dalam realitas, khususnya kenyataan NKRI. Oleh sebab itulah maka dapat ditegaskan bahwa pluralisme itu adalah suatu pandangan yang menganggap kenyataan itu terdiri atas lebih dari satu kenyataan yang azali.³⁰

²⁸R. Quirk, *Longman Dictionary of Contemporary English*, Second Edition, (London, England, Longman Group UK Limited, 1987), h. 792.

²⁹Prent, dkk, *Kamus Latin-Indonesia*, (Yogyakarta : Kanisius, 1969), h. 650.

³⁰Bandingkan dengan pendapat Dagobert D. Runes, *Dictionary of Philosophy*, (Totowa, New Jersey : Littlefield Adams & Co, 1979), h. 221.

Pluralitas sebagai kenyataan konkret bangsa Indonesia terlihat dalam berbagai dimensi seperti; geografis, budaya (bahasa, adat-istiadat, kesenian, agama). Kondisi geografis NKRI yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri atas 17.667 buah pulau besar dan kecil, 300 kelompok etnis dan lebih daripada 250 bahasa yang berbeda satu sama lain.³¹ Pluralisme kultur etnis dengan 18 lingkungan, 250 bahasa daerah, keanekaragaman sistem kekerabatan, gaya arsitektur, pertunjukan rakyat tradisional, kesemuanya itu jika tidak dihayati sebagai suatu khazanah dalam bingkai NKRI, maka akan menjadi boomerang bagi bangsa yang besar ini. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai bangsa, diperlukan suatu dialog cultural yang intens.

Penyebarluasan pemahaman dan internalisasi terhadap urgensitas sikap optimis menghadapi kemajemukan bangsa sebagai penyokong proses demokratisasi, menyebarluaskan multikultural dan multiagama yang berbasis pesan-pesan dan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan sikap keberagaman yang terbuka, demi menjamin keberlangsungan NKRI, adalah tugas pokok bagi siapa saja yang hidup di tanah air yang bernama Indonesia.

Di tengah pertentangan wacana dan gerakan politik dan masyarakat sipil dewasa ini dalam penyikapan pelbagai aliran agama dan politik yang berbeda (the Other). Meski revolusi komunikasi dan informasi telah meningkatkan kesadaran akan kemajemukan masyarakat pada semua kelompok masyarakat, masih banyak kelompok orang yang belum menganggap kemajemukan sebagai kenyataan yang positif dan punya basis Islam yang mendasar. Maka internalisasi kenyataan pluralisme Indonesia menjadi sangat penting

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam konteks bernegara, agaknya perlu disimak apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ali bahwa mengenal kemajemukan (pluralitas) tak sama dengan mengakui, memahami, dan menyakininya sebagai kenyataan yang mengandung kebajikan (pluralisme). Karena itu, perjuangan menyebarluaskan nilai-nilai positif

³¹Eka Dharmaputera, *Pancasila Identitas dan Modernitas*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1992), h. 21.

kemajemukan, tidak akan pernah kehilangan relevansi dan urgensinya. Sebab, kenyataan sosiologis negeri ini menunjukkan bahwa eforia reformasi telah membuka peluang kebebasan dan pengungkangan atas kebebasan sekaligus.

Suara-suara bising (*noisy voices*) muncul dari hampir semua individu dan kelompok yang pernah terkekang beberapa dekade sebelumnya. Ekspresinya bisa muncul berupa ceramah dan tulisan penuh kecaman dan hujatan, maupun aksi bersenjata, pemboman, penyerbuan massal, intimidasi fisik dan psikologis, teror serta pemaksaan mengikuti aliran satu agama. Semuanya menimbulkan hilangnya rasa aman dan damai di bumi pertiwi Indonesia.³²

Kenyataan itu diperkuat pula oleh pemahaman sempit sebagai orang akan makna pluralisme, sekulerisme, liberalisme, dan perkembangan aliran-aliran keagamaan di Indonesia. Akibatnya, sikap terbuka dan pluralisme dalam bermasyarakat menjadi makin sulit terwujud. Pluralisme misalnya, telah diyakini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kepercayaan (akidah) Islam. Ini diperparah kenyataan bahwa pemahaman makna dan maksud pluralisme dan kebebasan beragama tingkat elit dan kaum terdidik pun masih bermasalah. Disinilah pentingnya meluruskan kekeliruan berpikir (*fallacies*) tentang pluralisme.

Anggapan pertama menyebut pluralisme bukan berasal dari Islam dan tidak pernah muncul dalam sejarah pemikiran Islam yang otoritatif. Ayat-ayat tertentu dijadikan alasan membenarkan anggapan ini, seperti ketidakrelaan kaum Yahudi dan Nasrani terhadap Islam; hanya Islam agama yang ada disisi Allah, dan *anjuran jihâd fî sabîlillâh* terhadap syirik dan kekufuran. Ayat-ayat itu diambil secara parsial dan tekstual, tanpa memperhatikan sebab-sebab dan konteks diturunkannya. Padahal, Al-Qur'ân merupakan fondasi otentik pluralisme. telah mengakui perbedaan bahasa dan warna kulit, kemajemukan suku-bangsa, mengakui perbedaan kapasitas dan intelektualitas manusia, serta mengajak berlomba dalam kebajikan dan membiarkan sinagog-sinagog, gereja-gereja, masjid-masjid, dan tempat-tempat ibadah lainnya tetap berdiri kokoh.

³²Muhamad Ali, "Tantangan Pluralisme dan Kebebasan Beragama" makalah diskusi di Universitas Paramadina 17/07/2006.,

Lebih dari itu, Al-Qur'ân mengakui kebebasan berkeyakinan (untuk beriman atau tidak), serta masuk dan keluar dari agama tertentu. Al-Qur'ân juga sudah menjelaskan bahwa Nabi dan manusia manapun tidak mesti ampuh memberi petunjuk pada manusia lain, atau menyatakan sesat dan kufur kepada manusia lain. Dalam konteks ini, Islam harus ditafsirkan secara luas dan utuh, sehingga Islam dapat dilihat sebagai agama, system politik, pandangan hidup dan penafsiran sejarah Artinya Islam itu sarat nilai dan menjadi inspirasi tatanan kehidupan.³³

Penganut Yahudi, Kristen, dan Islam, adalah saudara seiman dan seapak, yaitu Ibrahim. Selain terhadap Yahudi dan Kristen, Islam juga bersaudara dengan seluruh penganut agama yang tidak sombong dan emoh berbuat kerusakan. Tuhan menurunkan ratusan ribu nabi dan rasul yang tidak sempat diceritakan. Karenanya, tak ada alasan untuk mengkafirkan dan mengutuk Konfusianisme, Buddhisme, Ahmadiyah, dan sebagainya. Al-Qur'ân juga sudah menjelaskan, tidak ada perbedaan mendasar antar para Nabi, dan perbedaan dan perselisihan antarumat beragama hendaknya diserahkan langsung kepada Dirinya kelak.³⁴

Pluralisme juga tidak berarti membenarkan semua atau menganggap tak bernilai semuanya (nihilistik). Sebab faktanya, ada saja manusia-manusia beragama yang ingkar karena kesombongan mereka. Juga ada manusia-manusia perusak yang mengklaim diri telah berbuat kebajikan di muka bumi. Namun manusia tetaplah dinilai Tuhan berdasarkan akal, hati, dan perbuatannya. Manusia tidak punya hak untuk menghakimi iman manusia-manusia lain. Manusia hanya dilihat dari aksi lahiriahnya, baik yang bajik maupun tidak bajik. Berbagai doktrin agama-agama, agama apapun ia, menunjukkan bahwa setiap agama mempunyai keprihatinan (*concern*) yang sama dalam menghadapi persoalan kemanusiaan seperti ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, perdamaian dan berbagai persoalan

³³Lihat, Malik Fadjar, "Kata Pengantar" dalam Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman Pendidikan*, (Yogyakarta : SIPRESS, 1994).

³⁴Lihat ulasan lebih luas, dalam Abdul Munir Mulkhan, dkk, *Agama dan Negara Perspektif : Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan*, (Yogyakarta : Institut DIAN/ Interfidei, 2002).

kemanusiaan manusia lainnya, yang ditengarai menjadi faktor pemicu adanya konflik horizontal, bukan pluralisme agama.³⁵

Pertebal Nilai-Nilai Universal

Kontribusi nyata pemikiran politik Islam bagi perdamaian dunia adalah himbawan kepada para elite politik, cendekiawan, rohaniawan, tokoh-tokoh partai, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, agar mempertebal nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal, seperti nilai keadilan, kejujuran, amanah, keterbukaan, kesatuan dan persatuan dalam suatu komunitas negara. Pada sisi yang lain, diharapkan tidak terlalu menonjolkan simbol-simbol dan identitas primordial religius, melainkan lebih menonjolkan identitas yang diterapkan berupa nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya sehari-hari, yang sudah barang tentu tidak lepas dari pandangan hidupnya, pandangan hidup berbangsa dan pandangan hidup bernegara. Perpaduan nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai budaya bangsa harus dibangun secara harmoni dengan membenteng benang merahnya, yaitu nilai-nilai universal yang dapat menjalin, merajut dan mengikat kesatuan dan persatuan, bagi keberlangsungan perdamaian dengan komitmen NKRI.

Pada tingkat sosiologis dan praktis, Nurcholish Madjid mengartikulasikan nilai-nilai universal Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara dengan ungkapan yang sudah sangat terkenal "Islam yes, partai Islam no".³⁶ Di sini Islam yang ingin ditekankan adalah seperangkat nilai-nilai, bukan organisasi,³⁷

³⁵Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman Pendidikan*, (Yogyakarta : SIPRESS, 1994), h. 24-27.

³⁶Pandangan Nurcholish ini menjadi inspirasi bagi dikembangkannya pemikiran politik Islam yang moderat, atau pemikiran yang mengkaitakan negara dengan agama secara simbiosis. Lihat, Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung : Mizan, 1987), h. 205.

³⁷Bahtiar Effendi menegaskan bahwa organisasi Islam, khususnya Partai Islam gagal dalam menjalankan misinya (kalah terus dalam pemilu), disebabkan oleh tiga hal utama, yaitu krisis leadership, miskin gagasan dan ide formalisasi Islam. Syari'at Islam memang harus dijalankan oleh setiap pemeluknya, tapi tidak mesti diformalisasikan dalam negara, sebagai contoh, gagasan tentang khilafah "tidak mungkin" tercapai, karena situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini sudah jauh berubah. Disampaikan dalam Seminar

yang dapat menjadi titik awal pertentangan kepentingan dari sebuah organisasi. Nilai-nilai itu lebih berada pada tingkat teologis dan filosofis dari pada hukum (fiqh) yang lebih sosiologis. Karena itu, pembaharuan pemikiran yang diusung oleh Nurcholish lebih menanamkan nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran Islam daripada Islam dalam wujudnya yang formal, seperti partai politik Islam, Bank Islam, dan lain sebagainya. Pemikiran Nurcholish tersebut dapat ditegaskan setolak dengan pemikiran *founding fathers* negeri ini, yaitu mementingkan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibangun di atas pondasi nilai-nilai universal, baik secara filosofis maupun teologis.

Formalisme atau legalisme agama-agama yang hadir dengan eksklusivitasnya dapat memunculkan kekerasan dan ketegangan, apalagi jika agama menjadi alat legitimasi kebijaksanaan penguasa, sehingga menimbulkan sikap apriori terhadap agama. Perspektif inilah agaknya yang menjadi keprihatinan Nurcholish, sehingga ia memunculkan istilah Islam yes, dan partai Islam no tadi, maka terhadap perspektif tersebut perlu dilakukan kritik terhadap agama dan peran para agamawan, bahwa persepsi serta formulasi keagamaan mereka telah menimbulkan kesenjangan (distansi) antara iman, ilmu, dan perilaku sosial politik. Akhirnya posisi agama kontradiktif dengan panggilan membangun peradaban. Oleh karena itu, kontribusi agama dipertegas lagi, yaitu sebagai kekuatan kritik, inspiratif terhadap proses transformasi sosial politik, dan harus tampil sebagai pembebas dari kekerasan dan benturan-benturan peradaban.

Epilog

Sumabangsih Islam terhadap perdamaian dunia dapat dikemukakan cukup signifikan, baik secara konsepsional maupun praksisnya. Semua bersumber dari ajaran-ajaran dasar Islam, dan praktek politik Rasulullah Saw dalam negara Madinah, yang juga diaplikasikan dalam pemerintahan Islam sesudahnya. Nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dalam pengembangan sistem politik Islam yang diniscayakan dapat menciptakan suasana

kondusif bagi perdamaian dunia, di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (*Al-Mukminûn* : 52); *Kedua*, Keharusan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan politik (*al-Syûrâ* : 38 dan *Âli Imrân* : 159); *Ketiga*, Keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat (*al-Hujurât* : 9); *Ketiga*, Kemestian mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi, (*al-Baqarah* : 190); *Keempat*, Kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan (*al-Anfâl* :61), *Kelima*, Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa (*al-Hujurât* : 13), dan *Keenam*, Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan (*al-Anfâl* : 60).

Jika ajaran Islam diamalkan dengan benar, kehidupan di muka bumi akan damai dan tentram, karena Islam itu merupakan rahmat bagi sekalian alam. Cukup dengan ayat-ayat di atas dapat ditegaskan bahwa "terorisme" dalam arti tindakan kekerasan, perang dan pemboman dengan mengakibatkan tragedi kemanusiaan, seperti kasus di menara kembar Amerika Serikat, Bom Bali I dan II, bom JW Mariot I dan II dan bom Ritz Carlton, yang kesemuanya telah merenggut ratusan bahkan ribuan nyawa orang-orang yang tidak berdosa; ini jelas-jelas tidak benar kalau bersumber dari ajaran Islam. Nilai-nilai ajaran Islam diberimakna universal, yaitu iman dan keadilan dan mempertanggungjawabkan tindakan sosial dan politiknya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tidak relevan mendikhotomi, atas dasar kebencian, ini golongan kami dan ini golongan mereka. Ini orang Barat dan yang ini orang Timur karenanya harus diperangi, harus dibom disebabkan beda akidah, dan sebagainya. Islam tetap konsisten menyokong perdamaian abadi di belahan bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm

- Agus, Bustanuddin, “Meluruskan Persepsi Pluralisme” dalam *Opini* Republika, Jumat, 15 Desember 2006.
- Ali, Muhamad, “Tantangan Pluralisme dan Kebebasan Beragama” *makalah* diskusi di Universitas Paramadina 17/07/2006,.
- Binder, Leonard, *Religion and Politics in Pakistan*, Los Angeles : The University of California Press, 1961.
- Dharmaputera, Eka, *Pancasila Identitas dan Modernitas*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1992.
- Effendy, Bahtiar, Seminar Nasional “Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Perdamaian”, Senin 19 Oktober 2009 di Hotel Grand Naggroe, Banda Aceh.
- Elbayar, Kareem, “Menjadi Muslim Moderat” dalam, *Opini* Kortem, Sabtu, 29 Desember 2007.
- Fadjar, Malik, “Kata Pengantar” dalam Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman Pendidikan*, (Yogyakarta : SIPRESS, 1994.
- Hanafi, Hasan, *al-Dîn wa al-Tsaurât fî Mishr 1952-1986, al-Dîn wa al-Tanmiyyât al-Qaumiyyât*, Kairo : Maktabat Madbûlî, 1989.
- Huijbers, Theo, *Manusia Mencari Allah Suatu Filsafat Ketuhanan*, Yogyakarta : Kanisius, 1985.
- Imarah, Muhammad, *Perang Terminologi, Islam Virsus Barat*, Jakarta : Rabbani Press, 1998.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta : Paramadina, 2000.
- Mâwardî, Imâm 'Âli ibn Muhammad Al-, *al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah wa al-Walâyât al-Dîniyyah*, Kairo : Musthofa al-Bâbî al-Halabi, 1983.
- Muhayya, Ahmad, Seminar Nasional “Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Perdamaian” di Hotel Brand Naggroe Banda Aceh, Senin 19 Oktober 2009.

- Mulkhan, Abdul Munir, dkk, *Agama dan Negara Perspektif : Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan*, Yogyakarta : Institut DIAN/ Interfidei, 2002.
- Muzadi, KH. A Hasyim, "Harmonisasi Masyarakat Multikultur-Multiagama" dalam *Opini*, Kortem, Selasa, 03 Oktober 2006.
- Muzadi, Hasyim, *Republika* 21 dan 22/10/2005.
- MZ, Zainuddin, *Indonesia (perspektif NKRI) siap berbeda, tetapi tidak harus berpisah*. Disampaikannya dalam satu jam lebih dekat dengan Zainuddin MZ di *TV One* 23 Juli 2009.
- Prent, dkk, *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius, 1969.
- Quirk, R., *Longman Dictionary of Contemporary English*, Second Edition, London, England, Longman Group UK Limited, 1987.
- Ramadan, Tariq, *Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa*, Bandung : Penerbit Mizan, 2002.
- Ritaudin, M. Sidi, *Paradigma Sinektika Politik Islam*, Bandarlampung : Penerbit Pusikamla, 2009.
- Runes, Dagobert D., *Dictionary of Philosophy*, Totowa, New Jersey : Littlefield Adams & Co, 1979.
- Satrawi, M Hasibullah, "Menyelami Lautan Pluralisme Islam" dalam *Opini* *Republika*, Jumat, 22 Desember 2006.
- Suseno SJ, Frans Magnis, *Fundamentalisme Agama dan Keagamaan Liberal*, Makalah yang disampaikan dalam seminar "Islam Liberal dan Islam Fundamental" FMPS Syarif Hidayatullah, Jakarta, 11 Mei 2002.
- Syamsuddin, Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Abu Zahrah (ed.), *Politik Demi Tuhan : Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.
- Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Tika, I Nyoman, "Agama, Politik dan Negara Perspektif Hindu", dalam, Abdul Munir Mulkahn, dkk, *Agama dan Negara Perspektif : Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan*, Yogyakarta : Institut DIAN/ Interfidei, 2002.

Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman Pendidikan*, Yogyakarta : SIPRESS, 1994.

Wahid, Abdurrahman, “Agama dan Demokrasi” dalam Elga Sarapung dkk (Tim Ed.), *Spiritual Baru Agama dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta : Institut DIAN/Interfidei, 2004.

Ya’kub, Hamzah, *Filsafat Ketuhanan*, Bandung : PT. Alma’arif, 1984.

*Dosen Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Alumni Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah.

